

**PERKAWINAN WANITA HAMIL DAN  
STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN  
(Studi Analisis Hukum Islam)**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan  
Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Oleh :

**IRMAYANTI SIDANG**  
**NIM : 10100114246**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : IRMAYANTI SIDANG  
Nim : 10100114246  
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 16 Februari 1996  
Jurusan : Peradilan Agama  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul : **Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang  
Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam).**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan (tanpa campur tangan penyusun) maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Makassar, 10 Juli 2018

Penyusun

**IRMAYANTI SIDANG**

Nim : 10100114246

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “PERKAWINAN WANITA HAMIL DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN (Studi Analisis Hukum Islam)”, yang disusun oleh Irmayanti Sidang, NIM: 10100114246, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 M, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Syari’ah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 02 Agustus 2018 M  
20 Dzulqaidah 1439 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Supardin, M.H.I.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Hj. Nurnaningsih, M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Hj. Patimah, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag.	(.....)

Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.  
NIP. 196210161990031003

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sebagaimana mestinya.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak terutama Ayah Drs. Lasidang M.Pd dan Ibu Dra. Hj. Masiani selaku orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan penulis curahan kasih sayang, nasihat, perhatian, bimbingan serta doa restu yang selalu diberikan sampai saat ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudariku yang tercinta beserta keluarga besar penulis, terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya selama ini dan serta berbagai pihak yang tulus dan ikhlas memberikan andil sejak awal hingga usainya penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit kekurangan dan kesulitan yang dialami oleh penulis, baik dalam kepustakaan, maupun hal-hal lainnya. Tetapi berkat ketekunan, bimbingan, petunjuk serta bantuan dari pihak lain akhirnya dapatlah disusun dan diselesaikan skripsi ini menurut kemampuan penulis. Kendatipun isinya mungkin terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, baik mengenai materinya, bahasanya serta sistematikanya.



Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun dan diselesaikan berkat petunjuk, bimbingan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, sudah pada tempatnyalah penulis menghanturkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah rela memberikan, baik berupa moril maupun berupa materil dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang terdalam dan tak terhingga terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya;
3. Bapak Dr. Supardin M.HI. selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar beserta ibu Dr. Hj. Patimah, M.Ag. selaku Sekertaris Jurusan Peradilan Agama;
4. Bapak Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag. selaku pembimbing I. yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, masukan sehingga skripsi ini selesai dengan baik;
5. Bapak Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag. selaku pembimbing II. Beliau, di tengah kesibukan dan aktifitasnya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini;

6. Ibu Dr. Hj. Nurnaningsih, M.A. selaku penguji I dan Ibu Dr. Hj. Patimah, M.Ag. selaku penguji II. yang telah memberikan bimbingan serta kritik dan saran dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;
8. Teman-teman dan sahabat-sahabat Peradilan E 2014, terkhusus pada Sahabat dari grup Ciwi-ciwi yaitu Dwi Erwiana Pasimai, Mardianti Makmur, Ayu Nurvita Jerana, Rafida Azis, Fajriah Ramadani, Ema Febrianti, Rizki Istithah, Fitri Adrianti, Syarifa Alisha Nadia, Fauziah Rezkyani, Yuliana, dan Widya Wati. yang memberikan banyak motivasi, dorongan, bantuan dan menjadi teman diskusi yang baik bagi penulis. serta sahabat lainnya yang tak dapat penulis sebutkan, terimakasih telah menjadi sahabat terbaik, siap membantu jika dalam kesulitan, menemani suka dan duka, memberikan semangat dan dukungan.
9. Seluruh teman KKN UIN Alauddin Makassar Angkatan 57 khususnya posko kelurahan Tettikenrarae, Kec. Marioriwawo, Kab. Soppeng, Mirnawati Umar, Nurul Hakimah Hafid, Nurwahidah S, Sasa Harkiah, Lian Pitaloka, Muhammad Hidayat, Ibnu Hadi, Rahmat Andika, Fajar. Terima kasih atas doa, dukungan dan kekeluargaannya selama dan setelah masa KKN, semoga langkah kita dimudahkan oleh Allah dalam mencapai impian masing-masing;

10. Seluruh keluarga besar penulis terutama kakak Nur Khaerat dan adik-adik saya Nur Afifah, Husnul Khatimah, dan Nur Hidayah yang telah memberikan dukungan yang tiada hentinya buat penulis.
11. Teman teman seperjuangan skripsi Maqbul, Awan, Byan, Ma'ruf, Ida, Madona dan Rirong yang selalu menghibur dan membantu penulis dalam memberikan kritikan dalam penyelesaian skripsi ini;
12. Teman-teman seangkatan Peradilan 2014 dan berbagai pihak yang namanya tidak dapat dituliskan satu per satu terima kasih telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis;

Atas segala bantuan, kerjasama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis, namun melalui doa dan harapan penulis, Semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dengannya dari Allah swt.

Akhirnya dengan penuh rendah hati penulis mengharap tegur sapa manakala terdapat kekeliruan menuju kebenaran dengan mendahulukan ucapan terima kasih yang tak terhingga.

Makassar, 10 Juli 2018

Penulis

**IRMAYANTI SIDANG**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
ABSTRAK .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-13
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pengertian Judul.....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN WANITA HAMIL DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN .....	14-43
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan .....	14
B. Pengertian Umum tentang Kawin Hamil .....	24
C. Tinjauan Umum tentang Anak .....	28
BAB III ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL.....	44-58
A. Perkawinan Wanita Hamil Menurut Fiqh .....	45



B. Perkawinan Wanita Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	57
<b>BAB IV STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI</b>	
<b>PERKAWINAN WANITA HAMIL.....</b>	<b>60-69</b>
A. Status Anak dari Perkawinan Wanita Hamil dalam Kompilasi	
Hukum Islam.....	60
B. Status Anak yang Dilahirkan Menurut Pendapat Ulama .....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69-71</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Implikasi Penelitian .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِى	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah</i> dan wau	au	a dan u

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِ...   اَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	i	i dan garis di atas
اِو	<i>ḍammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

### 4. Tā' Marbūṭah

*Transliterasi* untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf *س* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi (i).

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata



tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

#### 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## ABSTRAK

Nama : Irmayanti Sidang  
NIM : 10100114246  
Judul : Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)

---

Skripsi ini membahas tentang perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya perkawinan yang didahului kehamilan karena zina sebelumnya. Persoalan yang muncul adalah status perkawinan dan berakibat pada status anak yang dikandungnya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk: 1) untuk mengetahui dan menganalisis secara jelas status perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam. dan 2) mengetahui status anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil di tinjau dari hukum Islam.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syar'i. penelitian ini tergolong *library research*, data dikumpulkan dengan mengutip menyadur dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi terhadap literatur yang representatif dan relevan dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, adapun hasil penelitian ini adalah bahwa status hukum perkawinan wanita hamil akibat zina di kalangan ulama terdapat perbedaan karena ada sebagian ulama yang menyatakan sah dan sebagian lagi menyatakan tidak sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat (1) perkawinan wanita hamil akibat zina adalah sah bila yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya.

Mengingat status hukum perkawinan wanita hamil sah, maka status anak yang dilahirkan setelah perkawinan tersebut menjadi anak yang sah. Hal ini didasarkan pada redaksi Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 huruf a menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tetapi berbeda dengan hukum Islam yang disebut dalam kitab-kitab fiqh yang mensyaratkan minimal jarak waktu antara perkawinan dan melahirkan anak itu 6 (enam) bulan. Sementara menurut UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan terhadap wanita hamil, jika telah terpenuhi syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan itu adalah sah, sehingga status anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil tersebut adalah anak sah.

Implikasi dari penelitian ini adalah untuk menghindari dan mencegah terjadinya hamil di luar nikah, penanaman moral lewat pendidikan agama sedini mungkin terhadap generasi muda, agar tidak sampai terjadi perzinaan yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Dan kepada para pejabat lembaga Peradilan Agama, KUA, serta para akademisi, kiranya perlu adanya upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan wanita hamil.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. *Latar Belakang Masalah*

Pernikahan adalah suatu hal yang sangat sakral, baik menurut ajaran agama Islam maupun kedudukannya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah perbuatan hukum yang membawa pengaruh sangat besar dan mendalam bagi orang yang melakukannya maupun bagi masyarakat dan Negara. Sehingga pengertian luas dari perkawinan ialah ikatan lahir batin dan tanggung jawab yang berkelanjutan, tidak hanya sekedar hubungan keperdataan saja, tetapi hubungan antara sesama manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>1</sup>

Islam membangun kehidupan keluarga dan masyarakat atas dasar dua tujuan, yakni menjaga keluarga dari kesesatan dan bertujuan untuk menciptakan wadah yang bersih sebagai tempat lahir sebuah generasi yang berdiri di atas landasan yang kokoh dan teratur tatanan sosialnya. Oleh karena itu, Islam melarang adanya perzinahan, gundik dan mengambil istri yang tidak halal tanpa ikatan yang sah sebagaimana larangan Allah SWT.<sup>2</sup>

Perubahan zaman sekarang ini dapat dikatakan “jahiliah modern” karena didalamnya banyak terjadi kemaksiatan dan keangkaramurkaan yang menjamur

---

<sup>1</sup>Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata/BW* (Cet. I; Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1981), h. 7.

<sup>2</sup>Abduttawab Hakal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah Poligami dalam Islam vs Monogami Barat* (Cet. I; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h. 8-9.

terutama di dunia remaja, perbuatan maksiat yang timbul dari tidak terkendali nafsu syahwat cenderung menjerumuskan seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar norma-norma agama. Perilaku pergaulan bebas, mengumbar aurat dan seterusnya adalah imbas dari kesalahan para remaja dalam mengartikan cinta.

Akibat dari pergaulan gaya Barat tersebut adalah tersebar perzinahan dimana-mana dan hal itu bukan lagi dianggap sebagai masalah tabu bagi masyarakat. Dewasa ini, sering kali didengar anak-anak yang lahir dari hasil hubungan luar nikah, bahkan untuk menutupi kehamilan di luar nikah tersebut yang dilakukan tersebut justru mereka menutupinya dengan maksiat lagi dan berlipat-lipat dan berkepanjangan. Ada yang lari ke Dokter dan dukun kandungan, ada juga yang segera melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang menghamilinya atau orang lain sebagai tumbal agar kehamilannya diketahui masyarakat sebagai kehamilan yang sah.<sup>3</sup> Permasalahannya ternyata tidak hanya menyangkut masalah perbuatan zina dari para pelaku, melainkan pula menyangkut status nasib hidup bayi yang ada dalam kandungannya. Dalam konteks ini pula yang menjadi permasalahan pokok adalah mengenai status hukum pelaksanaan perkawinan dalam kondisi hamil tersebut.<sup>4</sup>

Di satu sisi, kebolehan bagi wanita hamil untuk melangsungkan perkawinan adalah bermaksud untuk menyelamatkan status hidup dan nasib bayi yang dikandungnya, agar setelah lahir mendapatkan hak yang sama dan

---

<sup>3</sup>Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Al-mawardi Prima, 2001), h. 86

<sup>4</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilalil Quran* (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), h. 24-55.

menghindari dari perlakuan diskriminatif. Namun di sisi lain, kebolehan bagi wanita hamil diluar nikah untuk melangsungkan perkawinan terkadang bisa menimbulkan kemadlaratan, diantaranya yaitu menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus perzinaan yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat.

Sementara dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat bab atau pasal khusus yang menjelaskan hukum perkawinan wanita hamil karena zina. Akan tetapi, boleh tidaknya wanita hamil karena zina menikah dapat dilihat dari segi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang tersebut.<sup>5</sup>

Peraturan yang mengatur masalah kawin hamil di Indonesia secara khusus di atur dalam pasal 53 KHI meskipun tanpa mengatur adanya masa *iddah* bagi wanita hamil tersebut. Dalam KHI, pada Pasal 53 di jelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil diluar nikah akibat zina, dengan pria yang menghamilinya, ketentuan dalam KHI ini sama sekali tidak menggugurkan status zina bagi pelakunya, meskipun telah dilakukan perkawinan setelah terjadi kehamilan di luar nikah. Hal ini akan semakin bertambah rumit ketika permasalahan dihubungkan pula pada status anak yang dilahirkan kemudian.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai

---

<sup>5</sup>Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 85.



akibat perkawinan yang sah.<sup>6</sup> Dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah.<sup>7</sup> Namun hal ini terdapat pengecualian dalam pasal 100 KHI yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>8</sup> Beberapa pendapat diatas menunjukkan bahwa masalah perkawinan bagi wanita hamil akibat zina merupakan hal yang kontroversial dan sangat rumit.

Penetapan asal usul anak memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan dapat diketahui hubungan nasab antara anak dan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya. Status keperdataan seorang anak, sah ataupun tidak sah, akan memiliki hubungan keperdataan dengan wanita yang melahirkannya. Hubungan keperdataan anak dengan ayahnya, hanya bisa terjadi bila anak tersebut adalah anak yang sah, anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan.<sup>9</sup>

Salah satu aspek yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah permasalahan hamil di luar nikah, yang selanjutnya mengkondisikan terjadinya suatu perkawinan dengan dasar si wanita telah hamil sebelumnya. Pelaksanaan

---

<sup>6</sup>Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, ( Bandung : Citra Umbara, 2013 ), h. 2.

<sup>7</sup>Pasal 99 KHI, ([http://id.islam.wikia.com/wiki/Kompilasi\\_Hukum\\_Islam](http://id.islam.wikia.com/wiki/Kompilasi_Hukum_Islam) di akses pada tanggal 17 april 2018 pukul 21.00 WITA).

<sup>8</sup>Pasal 100 KHI. ([http://id.islam.wikia.com/wiki/Kompilasi\\_Hukum\\_Islam](http://id.islam.wikia.com/wiki/Kompilasi_Hukum_Islam) di akses pada tanggal 17 april 2018 pukul 21.00 WITA).

<sup>9</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h. 220-221.

perkawinan dengan dasar si wanita telah hamil sebelumnya baik dari hukum Islam maupun hukum Perdata memberikan akibat hukum untuk sah atau tidaknya perkawinan tersebut serta hal-hal yang diakibatkan oleh perkawinan tersebut seperti status anak dan hubungan anak dengan orang tuanya.<sup>10</sup>

Dalam realitas kehidupan sehari-hari banyak di temukan permasalahan sosial yang timbul khususnya yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Fenomena pergaulan muda mudi masa kini banyak ditemukan terjadinya kasus-kasus perzinahan yang berujung kepada terjadinya pernikahan dimana mempelai wanitanya dalam kondisi hamil dan setelah itu terlahirlah anak yang kemudian dipertanyakan statusnya apakah anak yang dilahirkan dapat dikategorikan anak sah atau anak tidak sah. Berangkat dari sinilah penulis ingin mengkaji ketentuan hukum Islam tentang kawin hamil dan implikasinya terhadap kepastian status anak yang dilahirkan.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **“Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

---

<sup>10</sup><http://www.portalskripsi.com/read/analisis-hukum-tentang-perkawinan-wanita-hamil-dan-status-anak-yang-dilahirkan-ditinjau-dari-hukum-islam-dan-uu-no1-tahun-1974>

1. Bagaimana status hukum perkawinan wanita hamil ditinjau dari hukum Islam?
2. Bagaimana Status Anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan wanita hamil ditinjau dari hukum Islam?

### **C. Pengertian Judul**

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap istilah teknis yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah dalam judul ini sebagai berikut:

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' ialah ijab dan qabul (akad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam.<sup>11</sup>

Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria baik yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya.<sup>12</sup>

Status adalah keadaan atau kedudukan.<sup>13</sup>

Secara umum anak adalah seseorang yang lahir dari rahim seorang ibu sebagai akibat dari hasil hubungan persetubuhan pria dan wanita.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.35.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 45.

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/status>. Di akses pada tanggal 07 Mei 2018 Pukul 21.00 WITA.

<sup>14</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 112.

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu Allah SWT dan diformulasikan ke dalam empat produk pemikiran hukum yaitu, fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan, dan perundang-undangan yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.<sup>15</sup>

Dari beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud dari judul di atas adalah pembahasan mengenai status hukum perkawinan wanita hamil dan implikasinya terhadap status anak yang dilahirkan yang ditinjau dari hukum Islam.

#### **D. Kajian Pustaka**

Setelah Menyimak dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan dengan skripsi ini, maka penulis akan mengambil beberapa buku yang akan menjadi rujukan utama sebagai bahan perbandingan di antaranya:

Drs. H. M. Anshary MK, S.H, M.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 2010. Buku ini berisi tentang penjelasan sahny suatu pernikahan dan buku ini juga membahas tentang masalah perkawinan utamanya dalam masalah kawin hamil.<sup>16</sup>

Kemudian buku karya Ahmad Rofiq yang berjudul *Hukum Islam di Indonesia*, 2002. yang juga menjelaskan sedikit tentang hukum kawin hamil di Indonesia. Penjelasan tersbut dijelaskan pada bab XI yang menegaskan perlunya

---

<sup>15</sup><http://dmino.blogspot.co.id/2017/12/hukum-islam-di-indonesia.html> di akses pada tanggal 15 April 2018 pukul 21.30 WITA.

<sup>16</sup>Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010).

ketelitian dan perhatian yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah kawin dengan wanita hamil di luar nikah.<sup>17</sup>

Ishak Tri Nugroho, dalam skripsinya yang berjudul *Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqasid Syari'ah)*. Skripsi ini membahas tentang siapa yang berhak melakukan perkawinan dengan wanita yang hamil diluar nikah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 53 KHI dengan menjelaskan lebih jauh mengenai siapa yang dapat menikahi wanita hamil. Skripsi ini lebih menjabarkan tentang maksud dari Pasal 53 KHI yang mengatur tentang ketentuan kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil diluar nikah.<sup>18</sup>

Maryam Mahdalina, dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kawin Hamil (Studi di KUA Jagakarsa)*. Skripsi ini membahas bagaimana pendapat ulama setempat mengenai kawin hamil di luar nikah dan status sang anak. Kesimpulan yang didapat dari skripsi ini adalah bahwasanya mayoritas ulama menyebutkan bahwa wanita hamil karena zina boleh dinikahi oleh siapa saja, baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya.<sup>19</sup>

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 2006. Buku Ini banyak membahas masalah Hukum Perdata Islam yang digunakan di Indonesia saat ini, khususnya masalah

---

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002) .

<sup>18</sup> Ishak Tri Nugroho, *Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqasid Syari'ah)*, skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

<sup>19</sup> Maryam Mahdalina, *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kawin Hamil (Studi di KUA Jagakarsa)*, Skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2011).



perkawinan. Buku ini juga membahas sedikit mengenai hukum mengawini wanita hamil akibat zina dari pendapat ulama klasik.<sup>20</sup>

Kitab-kitab *fiqh* yang membahas mengenai masalah perkawinan wanita hamil di luar nikah antaralain kitab *fiqh* perbandingan yang berjudul *al-Fiqh 'alaāl-Madzahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri,<sup>21</sup> yang menjelaskan hukum perkawinan wanita hamil menurut pendapat ulama empat mazhab. Dan juga kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya ulama kontemporer, Wahbah az-Zuhaili yang juga menjelaskan masalah kawin hamil di era modern dari berbagai sudut pandang, baik dari pendapat para ulama hingga menjelaskan maksud tujuan dari hukum ketentuan kawin hamil itu sendiri dari sudut pandang ijtihad.

Selanjutnya kitab-kitab tafsir yang menguraikan masalah kawin hamil akibat zina diantaranya kitab *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah w as-Syari'ah wa al-Manhaj*, karya Wahbah az-Zuhaili, dan kitab *Ahkām al-Quran*, karya al-Rāzi.<sup>22</sup> Kitab yang menjelaskan Quran Surah an-Nur (24) ayat 3 sebagai dasar hukum dalam menyikapi masalah kawin hamil.

Dari beberapa penelitian dan karya ilmiah di atas, secara umum membahas tentang kawin hamil dalam hal realitas serta hukumnya. Meskipun ada beberapa skripsi dan penelitian yang menyinggung tentang hukum kawin hamil dan status anak, namun penelitian tersebut belum ada yang membahas tentang perkawinan

<sup>20</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

<sup>21</sup>Abdurrahmān al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al Mazhahib al-arba'ah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1989).

<sup>22</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah w as-Syari'ah wa al-Manhaj*, Cet ke-1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), XVII: 139. Lihat pula karya al-Rāzi, *Ahkām al-Quran*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), III: 264-267.

wanita hamil dan status anak yang dilahirkan ditinjau dari studi hukum Islam. Menurut penyusun judul ini penting untuk diteliti dengan maksud untuk mengetahui lebih mendalam mengenai status hukum kawin hamil dan status anak yang dilahirkan.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaahan yang dibahas.<sup>23</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>24</sup>

Peneliti juga menggunakan pendekatan *Syar'i* yang bersumber dari al-Quran dan hadits yang menjelaskan hukum apa saja yang mengatur tentang

---

<sup>23</sup>Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi II (Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983), h. 43.

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Rajawali Pers, Jakarta, 2001), h. 13-14.

perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan. Salah satu landasannya yaitu QS. An-Nur ayat 3.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode dalam bentuk catatan dan kutipan (studi pustaka), yaitu dengan cara mencari data dari beberapa buku, jurnal, termasuk pula undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti serta menurut pendapat para ahli hukum Islam. Data dikumpulkan dengan cara mengutip, menyadur dan menganalisis beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas.

### **4. Instrumen Penelitian**

Adapun alat-alat yang menjadi pendukung penelitian ini adalah:

- a. Buku catatan, yang digunakan penulis sebagai media untuk mencatat beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.
- b. Alat tulis, seperti pensil dan pulpen sebagai media tulis yang digunakan oleh penulis untuk menulis/menyalis beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Notebook, yang merupakan instrumen paling penting dalam proses penelitian ini, mengingat kegunaannya yang multi fungsi. Oleh penulis notebook digunakan sebagai media untuk mengolah analisis data.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang penulis maksud meliputi, editing, klasifikasi, verifikasi, dan kesimpulan.

- Editing adalah Melihat data yang memiliki kejelasan makna, kesesuaian dan relevansi dengan data yang lain.
- Klasifikasi adalah Pengelompokan data/sumber data yang berkaitan dengan objek yang dibahas dari berbagai referensi dan literatur yang berkaitan.
- Verifikasi adalah Melakukan pemeriksaan kembali terhadap data/sumber data yang diperoleh untuk menentukan keabsahahan data yang telah diperoleh.
- Kesimpulan adalah meramu data/sumber data yang telah didapat untuk mendapat jawaban atas permasalahan yang dibahas.<sup>25</sup>

### F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui secara jelas status pernikahan wanita hamil.
- b. Mengetahui Status anak yang di lahirkan di tinjau dari Hukum Islam.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Manfaat dan Kegunaan Penelitian ini adalah :

---

<sup>25</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85. [etheses.uin-malang.ac.id/68/7/09210005%20Bab%203.pdf](https://theses.uin-malang.ac.id/68/7/09210005%20Bab%203.pdf) (di akses pada tanggal 15 April 2018 pukul 20.23 WITA).

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan ilmu pengetahuan mengenai status perkawinan wanita hamil dan status anak yang dikandungnya.
- b. Menjadikan sumber inspirasi dalam rangka memberikan kontribusi ilmiah mengenai masalah perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan, sejalan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mengenai masalah hukum perkawinan bagi masyarakat awam umumnya yang kurang begitu jelas tentang hukum perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkannya.





## BAB II

### TINJAUAN UMUM PERKAWINAN WANITA HAMIL DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN

#### A. *Tinjauan Umum Tentang Perkawinan*

##### 1. **Pengertian Perkawinan**

Dalam hukum Islam, perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia disamping itu merupakan asal usul dari suatu keluarga, yang mana keluarga sebagai unsur dari suatu negara.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>26</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>27</sup> Para Ulama fiqih mempunyai perbedaan dalam merumuskan pengertian perkawinan diantaranya nikah adalah merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membolehkan atau menghalalkan hubungan kelamin sebagai suami istri, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah

---

<sup>26</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan.

<sup>27</sup>Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456

pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.

Kata nikah berasal dari bahasa arab yang di dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah menurut syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan.<sup>28</sup>

Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh, menurut Ahli Fiqih nikah pada hakekatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk diberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita itu (istri) dan membentuk rumah tangga.<sup>29</sup>

Perkawinan disebut sebagai ikatan lahir batin, karena perkawinan bukanlah hal yang dianggap sebagai permainan. Perkawinan memiliki tanggung jawab yang amat besar. Di dalamnya terdapat perjanjian antara suami dan istri yang masing-masing memikul kewajiban dan hak yang harus dijalankan. Substansi yang terkandung di dalamnya adalah menaati perintah Allah dan Rasul-Nya, yaitu mendatangkan kemaslahatan baik pelaku perkawinan itu sendiri (suami istri), anak cucu, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan bukan

---

<sup>28</sup>Sabri Samin, *Fikih II* (Cet.I; Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 2.

<sup>29</sup>Chuzaimah T.Yanggo dan hafiz Anshary, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer* (Cet.I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 53-54

hanya kebutuhan internal antara kedua belah pihak, akan tetapi juga faktor eksternal yang melibatkan banyak pihak.

Pernikahan adalah satu ritual pemersatu dua insan yang diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan. Sesuai QS ar-Ruum/30: 21.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>30</sup>

Maksud dari ayat di atas adalah di antara kesempurnaan kasih sayang Allah terhadap manusia adalah bahwa Allah menjadikan pasangan mereka dari jenis mereka sendiri. Allah menciptakan pada masing-masing pasangan itu rasa cinta dan kasih sayang. Karena tidaklah seorang laki-laki mempersunting seorang wanita terkecuali karena:

1. Rasa cinta dan kasih sayang yang terbukti dengan lahirnya anak dari rahim istrinya.
2. Sang isteri membutuhkan nafkah darinya.
3. Ingin menciptakan rasa cinta di antara mereka berdua, dan lain sebagainya.

---

<sup>30</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka, 2012), h. 406.

Adapun dalil dari Sunnah yang menjelaskan tentang dasar perkawinan ialah, Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara faraj. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi. (HR. Bukhari).<sup>31</sup>

Maksud Hadits di atas, dapat diuraikan bahwa perkawinan adalah perintah Allah dan merupakan Sunnah Rasul yang harus diikuti oleh umat-Nya. Kewajiban melaksanakan perkawinan merupakan kewajiban bagi orang yang mampu untuk menikah. Tentunya, kesanggupan tersebut tidak hanya dinilai atau dilihat dari segi materi dan non materi, sedangkan bagi yang tidak mampu hendaklah berpuasa. Sedangkan tujuan perkawinan dari dalil di atas adalah untuk menundukkan mata yang menjadi sumber hawa nafsu.

Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu “*mitsaaqan gholiizhan*” atau akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan perintah ibadah.

<sup>31</sup><https://alquransunnah.com/kitab/bulughulmaram/source/8.%20Kitab%20Nikah/1.%20Hadits-hadits%20tentang%20Nikah.html> di akses pada tanggal 19 Juni 2018 pukul 15.15 WITA.

Jadi dapat di simpulkan bahwa pernikahan bukan semata-mata legalisasi, dari kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan perempuan tetapi lebih dari itu pernikahan merupakan ikatan lahir batin dalam membina kehidupan keluarga. Dalam menjalankan kehidupan berkeluarga diharapkan kedua individu itu dapat memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan dirinya. Pernikahan sifatnya kekal dan bertujuan menciptakan kebahagiaan individu yang terlibat di dalamnya.

## **2. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan**

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.<sup>32</sup> Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan.

Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai.

---

<sup>32</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. 4; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 69.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum islam, akan dijelaskan berikut. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan Kholil Rahman<sup>33</sup>:

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Laki-laki
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat memberikan persetujuan
  - 5) Tidak terdapat haalangan perkawinan
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
  - 2) Perempuan
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat dimintai persetujuannya
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
  - 1) Laki-laki
  - 2) Dewasa
  - 3) Mempunyai hak perwalian
  - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya

---

<sup>33</sup>Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam* (Diktat tidak diterbitkan), Semarang: IAIN Walisongo, tt. h. 31-32.

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam ijab qabul
- 3) Dapat mengerti maksud akad
- 4) Islam
- 5) Dewasa

e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*.
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah.
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut diatas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi, maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 69-71.



### 3. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena bersifat subyektif. Namun demikian ada juga tujuan umum yang memang di inginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.

Nabi Muhammad SAW menganjurkan bahwa hendaklah tujuan dan pertimbangan agama serta akhlak yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan. Hal ini karena kecantikan atau kegagahan, harta dan pangkat serta lainnya tidak menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlak dan budi pekerti yang luhur.<sup>35</sup>

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.<sup>36</sup>

Firman Allah dalam surat an-Nisa/4: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya :

<sup>35</sup>Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*,(Bandung: Pustaka Setia,1999), h. 12.

<sup>36</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.46.

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>37</sup>

b. Melaksanakan libido seksualis

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya.

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 223.

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شَعَتُمْ<sup>ط</sup> وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ<sup>ظ</sup> وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.<sup>38</sup>

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي  
مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

<sup>37</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 78.

<sup>38</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 220.

Artinya :

Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah saw memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.<sup>39</sup>

Maksud dari ayat dan hadits di atas adalah nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, Wanita yang subur biasanya sehat, mudah mendapatkan anak yang bisa meneruskan keturunan, kerajaan dan amal pahala jariah untuk orang tuanya. dan nikahilah wanita yang penyayang akan setia menyayangi suami dan membuat suami sayang istri, suami akan lebih mudah mengurus hal nafkah, karena hal pribadi sudah diurus istri. Jangan menikahi wanita yang tidak mencintai/menyayangi suami karena memperbesar potensi timbulnya perceraian.

- c. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami istri dan menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota-anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.<sup>40</sup>

Adapun hikmah dari adanya penikahan antara lain:

1. Menyambung silaturahmi.

---

<sup>39</sup><https://alquransunnah.com/kitab/bulughulmaram/source/8.%20Kitab%20Nikah/1.%20Hadits-hadits%20tentang%20Nikah.html> di akses pada tanggal 19 Juni 2018 pukul 15.15 WITA.

<sup>40</sup> Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, h. 13.

2. Melestarikan manusia dengan perkembangan biak yang dihasilkan oleh pernikahan.
3. Kebutuhan suami istri kepada pasangannya untuk menjaga kemaluannya dengan melakukan hubungan seks yang fitriyah.
4. Kerja sama suami istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya.
5. Mengatur hubungan laki-laki dengan wanita berdasarkan asas pertukaran hak dan saling kerja sama yang produktif dalam suasana cinta kasih dan perasaan saling menghormati yang lain.

#### **B. Pengertian Umum tentang Kawin Hamil**

1. Menurut Dr. Zainuddin Ali, SH. dalam bukunya hukum Perdata Islam di Indonesia mengatakan bahwa:  

“Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya”.<sup>41</sup>
2. Menurut Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, MA dalam bukunya Fiqih Munakahat mengatakan bahwa:  

“kawin hamil” ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah baik dikawini dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki bukan yang menghamilinya”.<sup>42</sup>

Dari segi hukum, pasal 53 Kompilasi Hukum Islam mengatur perkawinan di maksud sebagaimana diungkapkan bahwa:

---

<sup>41</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. I; Palu : Yayasan Masyarakat Indonesia baru, 2002), h. 63.

<sup>42</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), h. 184.

- 1 Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2 Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3 Dengan di langungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan di atas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah An-Nur/24: 3 yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Terjemahnya :

laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.<sup>43</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan perkecualian karena laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-laki baik-baik untuk

---

<sup>43</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 324.

mengawini mereka. Jadi, bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut diharamkan untuk menikahinya.<sup>44</sup>

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ أَبُو الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودَ إِلَّا مَثَلَهُ".

Artinya:

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Musaddad Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris, dari Habib Al-Mu'allim, telah menceritakan kepadaku Amr ibnu Syu'aib, dari Sa'id Al-Maqbari, dari Abu Hurairah r.a. yang telah mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: "Seorang pezina yang telah didera tidak mengawini melainkan seseorang yang semisal dengannya".

Dalam hukum Islam juga ditetapkan sebuah perkataan sebagai istilah *Attazawwaju bil Hamili* yang dapat diartikan sebagai pernikahan seorang pria dengan wanita yang sedang hamil. Hal ini terjadi dua kemungkinan, yaitu dihamili dulu baru dikawini atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya.<sup>45</sup>

Pernikahan wanita hamil di luar nikah ini berkaitan dengan beberapa hal dalam hukum Islam, di antaranya :

- a. Sah atau tidaknya akad pernikahan dengan wanita tersebut menurut hukum Islam.

<sup>44</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 165.

<sup>45</sup> Mahjuddin, *Masā'il al-Fiqh, kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 35.

- b. Boleh atau tidaknya mengumpulinya sebagaimana layaknya suami istri.
- c. Kedudukan nasab (keturunan) anak yang dilahirkan.<sup>46</sup>

Dalam memilih seorang calon suami atau calon istri, Islam menganjurkan hendaknya didasarkan atas dasar norma agama atau moral, yakni seorang calon itu harus berakhlak yang mulia bukan hanya berdasarkan kepada kecantikan atau kekayaan atau kebangsawanan semata-mata.

Perkawinan disyariatkan supaya mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia akhirat di bawah naungan cinta kasih dan ridho Allah. Akan tetapi terlihat sekarang ini sebagian manusia banyak menyalahgunakan syariat perkawinan tersebut, dengan menodai makna dan faedah sebuah perkawinan yang suci yaitu dengan cara melakukan hubungan intim sebelum adanya ijab dan Kabul yang sah baik menurut agama maupun Undang-undang Negara.

Sering terjadi dalam masyarakat kita karena luasnya kesempatan untuk bergaul bebas di antara gadis remaja dan para pemuda yang disukainya, maka terjadilah kehamilan di antara para gadis remaja itu. Biasanya pelanggaran seperti itu diselesaikan menurut ketentuan hukum adat bahwa laki-laki yang menghamili gadis tersebut harus mengawininya, dan setelah pernikahan mereka selesailah kemelut tersebut tanpa dibesar-besarkan lagi permasalahannya.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Mahjuddin, *Masāil al-Fiqh, kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam*, h. 35.

<sup>47</sup>Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: UI Press, 1988), h. 20.



Terjadinya wanita yang hamil di luar nikah (yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara), selain daripada adanya sebuah pergaulan bebas, namun juga karena lemahnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karena itu untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang tersebut, pendidikan agama yang mendalam serta kesadaran hukum sangat diperlukan.

### C. Tinjauan Umum tentang Anak

#### 1. Pengertian tentang Anak

Anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah kepada para orang tua. Sebagai amanah tentu anak tersebut harus dijaga dan diperhatikan kelangsungan hidupnya dengan sebaik-baiknya karena para orang tua akan dimintai pertanggungjawaban berkenaan dengan anugerah yang telah diberikan kepadanya. Secara bahasa anak diartikan sebagai keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil. Dalam Bahasa Arab, anak disebut dengan menggunakan lafadz ولد ولد baik dengan dibaca *fathah*, *kasroh* maupun *dhomeh* huruf wawunya berarti bayi yang dilahirkan. *Jamaknya* adalah أولاد. selain itu, anak juga disebut juga dengan lafadz طفل dengan *tha* yang dibaca *kasrah*.<sup>48</sup>

Konsep anak dalam al-quran disebutkan dengan redaksi yang berbeda-beda dan dimaksudkan kepada arti yang berbeda pula. Paling tidak ada lima istilah yang dipakai Al-qur'an dalam menceritakan anak, yaitu *ibn*, *al-walad*, *shobiyyun*

---

<sup>48</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 856.

,*thiflun* dan *zuriyyah*. *Ibn* bentuk jamaknya adalah *abna'*. Menurut Al-Ashfahani, kata *ibn* diartikan sebagai suatu yang dilahirkan. Pada umumnya kata *ibn* di dalam Al-Qur'an mengacu pada status anak, baik disandarkan kepada nama bapak, nama Tuhan (Allah), ataupun sebutan lainnya.<sup>49</sup>

Secara umum anak adalah seseorang yang lahir dari rahim seorang ibu sebagai akibat dari hasil hubungan persetubuhan pria dan wanita.<sup>50</sup> Pengertian anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT.<sup>51</sup> Al-Quran menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang paling mulia yang diberi rizki yang baik serta dianugrahi dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk lainnya. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran Surah al-Isrā/17: 70 sebagai berikut :

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَهْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Terjemahnya :

Dan Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik

<sup>49</sup><http://iethafairuz.blogspot.co.id/2017/12/tinjauan-umum-tentang-anak-di-luar-nikah.html> di akses pada tanggal 19 maret 2018 Pukul 21.00 WITA .

<sup>50</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 112.

<sup>51</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27786/3/Chapter%20II.pdf>, diakses 13 April 2018 pukul 21 : 32 WITA.

dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.<sup>52</sup>

Anak adalah sosok yang memikul tanggung jawab di masa yang akan datang sehingga negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.<sup>53</sup> Diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>54</sup>

## **2. Macam-macam Anak Menurut Hukum**

### **1) Anak Sah**

---

<sup>52</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 289.

<sup>53</sup>Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* ( Jakarta : Prestasi Pustakaraya, 2012), h.4.

<sup>54</sup><http://iethafairuz.blogspot.co.id/2017/12/tinjauan-umum-tentang-anak-di-luar-nikah.html> di akses pada tanggal 25 maret 2018 Pukul 22.00 WITA .

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>55</sup> Pengertian tersebut memberikan penafsiran bahwa anak sah adalah anak yang dibenihkan dan lahir di dalam perkawinan yang sah. Begitu juga apabila anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah namun pembuahan dilakukan di luar perkawinan atau anak tersebut dibenihkan dalam perkawinan yang sah namun dilahirkan di luar perkawinan.<sup>56</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan atau dibenihkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya.<sup>57</sup> Dengan demikian seorang anak yang dibenihkan dalam perkawinan dan dilahirkan setelah perkawinan adalah anak sah. Begitu juga jika anak tersebut dibenihkan di luar perkawinan tapi lahir dalam perkawinan maka anak tersebut sah juga.<sup>58</sup>

Kompilasi Hukum Islam pasal 99 menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah serta hasil pembuahan suami-istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Dengan demikian seorang anak mendapat kedudukan sebagai anak sah apabila kelahiran anak tersebut didasarkan pada perkawinan orang tuanya yang sah atau telah didahului oleh perkawinan yang sah.<sup>59</sup>

---

<sup>55</sup>Pasal 42 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>56</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013), h. 181.

<sup>57</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), h. 69.

<sup>58</sup>Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian ,Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta : Bina Aksara, 1986), hal. 145.

<sup>59</sup>Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, h. 39.

## 2) Anak Zina

Perzinaan dalam pandangan hukum barat adalah hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dimana salah satu atau keduanya sedang terikat perkawinan dengan orang lain. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan KUH Perdata yang menganut asas monogami sebagaimana tertera pada pasal 27 yaitu pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.<sup>60</sup>

Sementara dalam pandangan hukum Islam, yang dapat disebut anak zina adalah setiap anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, baik salah satu atau keduanya terikat pernikahan dengan orang lain ataupun tidak. Artinya anak tersebut dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat dalam pernikahan tanpa memandang apakah salah satu dari mereka terikat pernikahan dengan orang lain atau tidak. Berbeda dengan konsep yang dianut oleh hukum barat bahwa anak zina tidak memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya, namun dalam Hukum Islam disebutkan bahwa anak zina otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>61</sup> Hal senada juga dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang

<sup>60</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 21.

<sup>61</sup>Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>62</sup>

### 3) Anak Sumbang

Anak sumbang yaitu anak yang lahir dari hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan dimana keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan.<sup>63</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seseorang dilarang untuk melangsungkan perkawinan apabila :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri
- d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.<sup>64</sup>

### 4) Anak Luar Kawin Lainnya

Witanto membagi anak luar kawin lainnya ini menjadi tiga, yaitu anak luar kawin yang dapat diakui, anak *mula'annah* dan anak *syubhat*.

#### 1. Anak luar Kawin yang dapat diakui

<sup>62</sup>Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>63</sup>Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan.*, h. 41.

<sup>64</sup>Pasal 70 (d) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8 UU Perkawinan.

Yang dimaksud dengan anak luar kawin yang dapat diakui ini adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah selain anak zina dan anak sumbang sebagaimana disebutkan dalam KUH Perdata. Namun dalam konsep Islam, anak tersebut adalah sama dengan anak zina. Dalam KUH Perdata disebutkan bahwa anak luar kawin tersebut dapat diakui oleh orang tua biologisnya sehingga ada kemungkinan dia memiliki hubungan keperdataan dengan mereka. Sebaliknya anak luar kawin tersebut tidak bisa memiliki hubungan perdata baik dengan ayah atau ibunya tanpa adanya pengakuan dari mereka.<sup>65</sup>

## 2. Anak *mula'ana*

*Li'an* diambil dari kata *la'ana* yang berarti kutukan. *Li'an* adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berzina dan atau suami tidak mengakui anak yang dikandung atau yang telah dilahirkan oleh istrinya, sementara sang istri mengingkari tuduhan tersebut.

## 3. *Syubhat* pada hukum

*Syubhat* jenis ini adalah *syubhat* karena adanya keanekaragaman pendapat terhadap suatu permasalahan. Akibat banyaknya pendapat tersebut sehingga seseorang bingung untuk menentukan pendapat mana yang akan dijadikan pedoman.<sup>66</sup>

## 5) Anak Angkat

---

<sup>65</sup>Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. h. 45.

<sup>66</sup>Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta : Amzah, 2015), h. 83-85.



Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.<sup>67</sup> Tindakan pengangkatan anak tersebut tidak menimbulkan terputusnya hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Anak angkat tersebut tetap dapat menerima warisan dari orang tua kandungnya. Tujuan pengangkatan anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak yang dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan ketentuan adat setempat.<sup>68</sup>

#### 6) Anak Tiri

Anak tiri adalah anak yang dibawa masuk kedalam sebuah perkawinan baru orang tua dimana anak tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya. Seorang anak tiri memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah terhadap orang tua kandung dan hak mewaris juga hanya didapatkan dari orang tua kandung. Oleh karena itu, jika orang tua tiri ingin memberikan sebagian harta kepada anak tirinya, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan *hibah* atau *wasiat wajibah* yang jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta. Meskipun anak tiri tidak dapat mewaris dari orang tua tirinya, namun hak dan kewajiban

---

<sup>67</sup>Pasal 1 PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

<sup>68</sup>Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, h. 49.

alimentasi antara anak dan orang tua tiri tetap berlaku sebagaimana hak dan kewajiban alimentasi antara orang tua dan anak kandung.<sup>69</sup>

#### **7) Anak secara Psychologis**

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Menurut John Locke, anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Augustinus yang dipandang sebagai peletak dasar permulaan psikologi anak, mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.<sup>70</sup>

#### **8) Anak secara Sosiologis**

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Hak asasi anak dilindungi di dalam Pasal 28 (B)(2) UUD 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh

---

<sup>69</sup>*Ibid*, h.54-56.

<sup>70</sup>Sumadi Suryabrata, *Pengembangan Alat Ukur Psychologis* (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), h. 12.

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut UU Kesejahteraan, Perlindungan, dan Pengadilan anak pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak merupakan kelompok yang sangat rentan dan unik, baik fisik maupun mental, maka dibutuhkan mekanisme yang independen untuk melindungi dan mendukung hak-hak mereka. Oleh karena kerentanan atau kelemahan jiwa anak, maka harus mendapat pembinaan, perlindungan dan pengawasan secara intensif dan berkesinambungan untuk menjunjung kualitas jiwa anak itu sendiri dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran serta masyarakat, Lembaga keagamaan, Lembaga swadaya masyarakat, Organisasi sosial, Dunia usaha, Media Masa dan Lembaga Pendidikan.

### 3. Kedudukan Anak

Kedudukan anak dalam Islam sangat tinggi dan mulia. Al-Quran memposisikan anak sebagai perhiasan dunia. Hal tersebut tercantum dalam al-Quran Surah al-Kahfi/18: 46 sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا  
وَحَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Terjemahnya :

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.<sup>71</sup>

<sup>71</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 299.

Al-Quran juga menyebutkan anak sebagai hiburan sebagaimana tertera dalam al-Quran Surah al-Furqan/25: 74 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Terjemahnya :

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri dan keturunan sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."<sup>72</sup>

Namun harus disadari pula bahwa predikat yang begitu mulia dan tinggi terhadap anak tersebut hanya dimiliki oleh anak yang berpredikat sebagai anak sah sebagai akibat dari pernikahan yang sah pula.<sup>73</sup> Islam mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan secara sah memiliki kedudukan yang baik dan terhormat. Ia memiliki hubungan dengan ayah dan ibunya, sehingga antara anak dan orang tua tersebut timbul hak dan kewajiban. Anak berkewajiban menghormati dan mentaati orang tuanya sepanjang tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Sebaliknya, orang tua berkewajiban mendidik dan menafkahi anak sesuai dengan perkembangan anak itu sendiri.<sup>74</sup>

Orang tua wajib memberikan hak anak secara total, baik hak penjaagaan dan pemeliharaan, hak *nasab*, hak nama baik, hak penyusuan, pengasuhan,

<sup>72</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 366.

<sup>73</sup>Musthofa Rahman, *Anak Luar Nikah Status Dan Implikasi Hukumnya* (Jakarta : Penerbit Atmaja, 2003), h. 63.

<sup>74</sup>Chuzaimah T. Yanggo Dan Hafiz Anshary (Eds), *Problematika Hukum Islam Kontemporer 1* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008), h. 132.

warisan bahkan pendidikan dan pengajaran. Islam tidak membenarkan menghubungkan nama anak kepada selain bapaknya, meskipun anak angkat kepada bapak angkat.

Nabi SAW bersabda :

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

Artinya :

Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi' dan Abd bin Humaid, Ibnu Rafi' mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Razaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari az-Zuhri dari Ibnu Musayyab dan Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : "seorang anak adalah untuk pemilik ranjang, sedangkan orang yang menzinai tidak mempunyai hak atasnya."<sup>75</sup>

Hadits di atas menunjukkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang sah dihubungkan *nasabnya* kepada bapaknya. Implikasi dari hubungan *nasab* tersebut otomatis membuat anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan bapak sehingga ia berhak mendapatkan waris, nafkah, perwalian serta hak keperdataan lainnya. Sebaliknya anak yang lahir di luar pernikahan yang sah tidak tidak dapat dihubungkan *nasabnya* kepada bapaknya namun hanya kepada ibu dan keluarga ibunya.<sup>76</sup> Hal tersebut senada dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 43(1) jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang

<sup>75</sup>Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 3 Shahih Muslim* 2, Penerj. Ferdinand Hasmand Dkk (Jakarta : Almahira, 2012), h. 701.

<sup>76</sup>Chuzaimah T. Yango Dan Hafiz Anshary (Eds), *Problematika Hukum Islam Kontemporer 1*, h. 135.

menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapak dan keluarga bapaknya sehingga anak tersebut tidak berhak atas waris, nafkah, perwalian serta hak keperdataan lainnya.

Ibnu Hazm menegaskan bahwa anak yang lahir akibat perzinaan hanya ada hubungan saling mewarisi dengan ibu kandungnya. Ia juga hanya mempunyai hak-hak seperti perlakuan baik, pemberian nafkah, hubungan kemahraman dan berbagai ketentuan hubungan hukum lain dengan ibu kandungnya saja.<sup>77</sup> Para ulama sepakat bahwa anak yang lahir akibat perzinaan berkedudukan sebagai orang lain dengan bapak biologisnya, sehingga ia tidak dapat saling mewarisi dan tidak dapat dihubungkan *nasabnya* dengan bapak biologisnya. Selain itu, bapaknya juga tidak berkewajiban untuk memberi nafkah, tidak diperkenankan untuk duduk berduaan serta tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak perempuan zinanya.<sup>78</sup>

Aturan tersebut sangat berbeda dengan konsep yang dipakai dalam hukum perdata. Anak yang dilahirkan di luar nikah selain anak zina dan anak sumbang dapat diakui sebagai anak sah apabila anak tersebut mendapat pengakuan. Pengakuan tersebut tentu melahirkan status baru bagi anak tersebut karena dengan adanya pengakuan oleh kedua orang tua biologisnya maka

---

<sup>77</sup>Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2013), h. 118.

<sup>78</sup>Abdu ar-Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, jilid 5, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003, h. 121.

muncullah status dan hak anak di hadapan hukum. Anak yang sebelumnya tidak memiliki hak apapun terhadap ayah dan ibunya menjadi memiliki hak waris dan hak keperdataan lainnya.<sup>79</sup>

KUH Perdata membagi anak luar kawin menjadi tiga bagian, yaitu anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin yang dapat diakui. Seorang anak mendapat status sebagai anak zina adalah apabila ia dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan dengan orang lain. Sedangkan anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terlarang untuk melakukan pernikahan.<sup>80</sup> Dalam KUH Perdata disebutkan bahwa anak zina maupun anak sumbang itu tidak dapat diakui oleh kedua orang tua biologisnya. Anak zina dan anak sumbang dianggap tidak mempunyai orang tua secara yuridis, sehingga menjadikan mereka tidak mempunyai hak keperdataan apapun kepada orang tua biologisnya, baik ayah maupun ibu kandungnya. Mereka tidak mendapatkan bagian warisan apabila orang tuanya meninggal. Bahkan mereka hanya berhak untuk mendapatkan hak nafkah hidup seperlunya berdasarkan kemampuan ayah dan ibu serta ahli waris yang sah menurut undang-undang.<sup>81</sup>

Sementara anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah selain anak zina dan anak sumbang. Anak

---

<sup>79</sup>Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, h. 107-108.

<sup>80</sup>Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, h. 109.

<sup>81</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), h. 71.



dalam kategori ini dapat dianggap sebagai anak sah apabila dilakukan pengakuan terhadapnya. Karena dianggap sebagai anak sah, maka ia memiliki hubungan keperdataan dengan bapak dan ibu biologisnya setelah adanya pengakuan dari keduanya.<sup>82</sup> Pengakuan anak yang telah dilakukan oleh orang tua biologis tidak hanya berakibat pada munculnya hak waris bagi anak terhadap ayah atau ibunya, namun juga dapat menimbulkan hak waris bagi ayah atau ibu terhadap anak tersebut apabila anak tersebut meninggal terlebih dahulu.<sup>83</sup> Anak sah dan anak luar kawin yang diakui sama-sama memiliki hak terhadap harta peninggalan orang tua, hak *saisine*, hak *hereditatis petitio* dan hak untuk menuntut pemecahan warisan. Akan tetapi diantara keduanya terdapat perbedaan yaitu anak luar kawin meskipun telah diakui, namun kedudukan mereka hanya dibawah perwalian orang tua mereka, hak bagian warisan mereka berbeda dengan bagian anak sah dan mereka tidak memiliki hubungan apa-apa selain dengan orang tua yang mengakuinya saja.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup>KUH Perdata Pasal 280

<sup>83</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 73.

<sup>84</sup>Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, h. 120.

### **BAB III**

## **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP**

### **PERKAWINAN WANITA HAMIL**

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dari ajaran Tuhan yang maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.

Perkawinan wanita hamil merupakan perkawinan yang didahului dengan adanya sebab perzinaan yang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan yang sah. Yang di maksud dengan “kawin hamil” disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.<sup>85</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit tidak ada mengatur tentang perkawinan wanita hamil tetapi secara implisit ada yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa : “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

---

<sup>85</sup>Drs. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A, *Fiqh Munakahat* ( Bogor: Kencana, 2003), h. 124.

kepercayaannya itu”.<sup>86</sup> Menurut hukum agama Islam, suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat menurut Hukum Islam. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidak sahnya perbuatan dari segi hukum.<sup>87</sup>

Namun dalam Hukum Islam telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 53 yang mengatur tentang perkawinan wanita hamil. selain itu terdapat beberapa pendapat dari para ulama mazhab mengenai hukum dari permasalahan kawin hamil. diantara pendapat tersebut lebih kepada dua pendapat yang intinya adalah pendapat yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan perkawinan wanita hamil akibat zina.

### **1. *Perkawinan Wanita Hamil Menurut Fiqh***

Dalam masalah kawin hamil terdapat perselisihan pendapat para ulama sebagai berikut:

#### **a. Menurut Pendapat Mazhab Syafi’i**

Imam Syafi’i dan ulama-ulama Syafi’iyyah yang berpendapat membolehkan atau menganggap sah perkawinan wanita hamil akibat zina baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain tanpa harus menunggu bayi yang dikandungnya lahir. Pernikahan yang dilakukan wanita meskipun dalam keadaan hamil diperbolehkan menurut mazhab syafiiyah selama pernikahan tersebut memenuhi syarat nikah dan adanya ijab kabul. Wanita yang

---

<sup>86</sup>Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>87</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 59.

hamil akibat zina, maka tidak ada hukum kewajiban ‘*iddah*’ baginya, dan diperbolehkan untuk menikahinya dan juga menggaulinya.<sup>88</sup>

#### b. Menurut Mazhab Hanafi

Imam Abu hanifah pun mengemukakan pendapat yang hampir sama, bahwa perkawinan bagi wanita hamil adalah sah dengan syarat yang menikahinya adalah pria yang menghamilinya. Adapun laki-laki yang bukan menghamilinya tetap sah melakukan perkawinan dengan wanita hamil akibat zina akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan intim sampai si wanita melahirkan bayi yang dikandungnya. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa wanita hamil karena zina tidak diwajibkan baginya masa ‘*iddah*’, karena ‘*iddah*’ bertujuan menjaga nasab, Sehingga boleh untuk menikahi wanita hamil tanpa harus menunggu masa ‘*iddah*’.<sup>89</sup> Hal ini dikarenakan bahwa wanita hamil akibat zina tidak termasuk kategori wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, maka perkawinan wanita hamil diperbolehkan. Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam Qur’an Surah an-Nisa/4: 24 yang berbunyi:

... وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ. ...<sup>ج</sup>

Terjemahnya:

“.... dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina ....”<sup>90</sup>

<sup>88</sup>Abdurrahmān al-Jaziri, *kitab al-Fiqh* (Mesir, Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1969), h. 523.

<sup>89</sup>As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 1983), h. 282-283.

<sup>90</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 406.

Berdasarkan ayat di atas wanita pezina itu tidak termasuk ke dalam golongan perempuan yang haram dinikahi, Perempuan yang hamil karena zina termasuk dalam katagori mutlaq perempuan yang dihalalkan untuk dinikahi pada ayat diatas, sementara itu, tidak dalil atau ‘illat lain yang menunjukkan kepada haram menikahnya. Sebab itu ia boleh dinikahi.

Jadi wanita hamil boleh dinikahi oleh siapa pun, baik yang menikahnya itu laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya, beliau beralasan sama dengan mazhab syafi'i, namun ada syarat yang beliau kemukakan, yaitu seandainya yang menikahi wanita hamil itu laki-laki yang bukan menghamilinya, maka boleh menikahi namun tidak boleh mencampuri wanita itu sebelum ia melahirkan.

Dasar hukum lain yang dijadikan landasan yaitu ketika Rasulullah ditanya mengenai seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, kemudian laki-laki berniat mengawininya, saat itu Rasulullah menjawab:

لا يحرم الحرام الحلال

Artinya :

*“Perbuatan haram tidak mengharamkan yang halal”*. (H.R. al-Baihaqi dari ‘Aisyah)

Hadits di atas menjelaskan bahwa perzinaan merupakan perbuatan yang haram, sedangkan perkawinan merupakan perbuatan yang halal, sehingga dalam konteks hadits ini menunjukkan bahwa perbuatan yang haram (perzinaan) tidak

dapat megharamkan perbuatan yang halal (perkawinan). Dengan demikian, keharaman perzinaan tidak dapat mengharamkan halalnya pelaksanaan perkawinan, meskipun yang melangsungkan perkawinan adalah pelaku zina, yakni pasangan yang melakukan perzinaan sehingga menyebabkan wanita hamil.

Qaidah Fiqh berbunyi :

الأصل في الأشياء الأباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya :

*“Asal sesuatu adalah boleh sehingga ada dalil yang menunjukkan kepada haram”.*<sup>91</sup>

Karena tidak ada hal-hal yang menyebabkan haram atau tidak sah, maka hukumnya adalah boleh.

### c. Menurut Mazhab Maliki

Pendapat sebaliknya dikemukakan oleh Imam Malik bin Anas, yang mengharamkan secara mutlak pelaksanaan kawin hamil. Imam Malik berpendapat bahwa hukum menikahi wanita hamil akibat zina adalah tidak sah, baik yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya.<sup>92</sup> Sehingga wanita hamil di luar nikah harus menunggu hingga bayi yang dikandungnya lahir terlebih dahulu baru kemudian dia bisa melangsungkan akad perkawinan. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang digauli karena zina maka hukumnya sama seperti halnya digauli karena

<sup>91</sup> Al-Suyuthi, *al-Asybah wal-Nadhair*, al-Haramain, Singapura, h. 43.

<sup>92</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami* (Cet ke-1; Beirut: Dār al-Fikr, 1991), h. 150.

syubhat, baik berdasarkan akad yang *bathil* maupun *fasid*, maka ia harus menjalani ‘*iddah*’ sebagaimana masa ‘*iddah*’ pada umumnya. Kecuali apabila dikehendaki *haddi* atas dirinya maka dia cukup mensucikan dirinya dengan satu kali haid.<sup>93</sup>

#### **d. Menurut Mazhab Hanbali**

Pendapat yang serupa dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pun berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik laki-laki yang menzinainya maupun laki-laki yang bukan menzinainya. Perempuan pezina, baik ia hamil atau tidak, tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya itu, kecuali dengan dua syarat:

1. Telah habis masa iddahnya. Namun jika ia hamil, maka iddanya habis sampai dengan melahirkan anaknya, dan belum boleh mengawininya sebelum habis masa iddanya itu.
2. Telah taubat wanita itu dari perbuatan maksiatnya, dan jika ia belum bertaubat, maka tidak boleh mengawininya.<sup>94</sup>

Apabila telah sempurna kedua syarat itu, yaitu telah habis masa iddahya dan telah bertaubat dari dosanya, maka halal mengawini wanita itu bagi laki-laki yang menzinainya ataupun laki-laki lain.

---

<sup>93</sup>Memed Humaedillah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya* (Jakarta; Gema Insani, 2002), h. 34-39.

<sup>94</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 45



Adapun Ulama lain yang berpendapat mengenai hukum perkawinan wanita hamil sebagai berikut:

Ibnu Hazm (Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain:

- a. Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata: “Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.
- b. Seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada Khalifah Abu Bakar dan berkata: Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan. Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hubungan dera (cambuk), kemudian dikawinkannya.

Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama:<sup>95</sup>

- a. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid). Pendapat beliau ini itu berdasarkan firman Allah dalam Quran Surah an-Nur/24: 3.

---

<sup>95</sup>Drs. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A, *Fiqh Munakahat* ( Bogor: Kencana, 2003), h. 125.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.<sup>96</sup>

Maksud ayat tersebut adalah, tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina. Demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina.

Asbabun Nuzul dari ayat di atas adalah dalam suatu riwayat ada dikemukakan bahwa Ummu Mahzul seorang wanita pezina akan dikawini oleh seorang sahabat Nabi. Maka turunlah ayat ini (Surah an Nuur: 24: 3) sebagai penjelasan bahawa seorang wanita pezina haram untuk dikawini kecuali oleh pezina juga atau musyrik. (Diriwayatkan oleh an Nasa'i dari Abdullah bin Umar).

Dalam riwayat lain ada dikemukakan bahawa Mazid mengangkut barang dagangannya dari Ambar ke Mekah untuk dijual di sana. Pada ketika itu dia bertemu kembali dengan kawannya seorang wanita yang bernama Anaq seorang wanita pezina. Kemudian Mazid meminta izin kepada Nabi untuk mengawininya. Selepas itu turunlah ayat ini (Surah an Nuur: 24: 3) lalu Rasulullah bersabda: "Ha! Mazid! Seorang pezina tidak akan dikawini kecuali oleh pezina juga. Oleh kerana itu janganlah engkau menikah dengannya." (Diriwayatkan oleh Abu Daud, at

<sup>96</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 324.

Tirmizi, an Nasa'I dan al Hakim dari Hadis Amr bin Syuaib dari bapanya dari datuknya).

Dalam riwayat lain pula ada dikemukakan bahwa ketika Allah mengharamkan zina, terdapat wanita-wanita penzina yang cantik rupa parasnya di kalangan mereka. Kemudian berkatalah orang-orang pada ketika itu: "Jangan dibiarkan mereka pergi dan biarkan mereka kawin."

Maka turunlah ayat ini (Surah an Nuur: 24: 3) sebagai penjelasan bahawa wanita penzina hanya boleh dikawini oleh penzina juga atau musyrik. (Diriwayatkan oleh Said bin Mansur dari Mujahid)

Dalam hadits 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya 'Abdullah bin 'Amr bin 'Ash, beliau berkata:

أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى بِمَكَّةَ وَكَانَ بِمَكَّةَ  
امْرَأَةً بَغِيٍّ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ. قَالَ: فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْ عَنَاقًا؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي فَتَرَلْتُ:  
((وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ)) فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ. وَقَالَ: لَا تَنْكِحُهَا

Artinya :

*"Sesungguhnya Martsad bin Abi Martsad Al-Ghonawy membawa tawanan perang dari Makkah dan di Makkah ada seorang perempuan pelacur disebut dengan (nama) 'Anaq dan ia adalah teman (Martsad). (Martsad) berkata: "Maka saya datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam lalu saya berkata: "Ya Rasulullah, Saya nikahi 'Anaq?" Martsad berkata: "Maka beliau diam, maka turunlah (ayat): "Dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik." Kemudian beliau memanggilku lalu membacakannya padaku dan beliau berkata: "Jangan kamu nikahi dia." (Hadits hasan, riwayat Abu Daud no. 2051, At-Tirmidzy no. 3177, An-Nasa'i 6/66 dan dalam Al-Kubra 3/269, Al-Hakim 2/180, Al-Baihaqy 7/153, Ibnul Jauzy dalam At-Tahqiq*

no. 1745 dan disebutkan oleh Syeikh Muqbil *rahimahullahu* dalam *Ash-Shohih Al-Musnad Min Asbab Nuzul*.<sup>97</sup>

Hadits ini tegas menunjukkan *haram* nikah dengan perempuan pezina. Namun hukum *haram* tersebut bila ia belum bertaubat. Adapun kalau ia telah bertaubat maka terhapuslah hukum *haram* nikah dengan perempuan pezina tersebut berdasarkan sabda Rasulullah *shollallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam*:

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

Artinya :

“Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa baginya.” (Dihaskan oleh Syeikh Al-Albany dalam *Adh-Dho’ifah* 2/83 dari seluruh jalan-jalannya).

Ayat tersebut di atas diperkuat oleh hadits Nabi:

روي سعيد بن المسيب أن رجلا تزوج امرأة فلما أصابها وجدها حبلى فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما وجعل لها الصداق وجدها مائة (أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي)

Artinya:

“Sesungguhnya seorang laki-laki yang mengawini seorang wanita, ketika ia mencampurnya ia mendapatkannya dalam keadaan hamil, lalu dia laporkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi menceraikan keduanya dan wanita itu diberi maskawin, kemudian wanita itu didera (dicambuk) sebanyak 100 kali.”

<sup>97</sup>Syeikh Muqbil, *Ash-Shahih Al-Musnad Min Asbab an- Nuzul* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), h. 297.

Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dengan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat:<sup>98</sup>

- 1) Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin.
  - 2) Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.
- b. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya itu sah tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.

Pendapat ini berdasarkan hadits:

أَتَوْطَأُ حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ

Artinya:

*"Janganlah engkau campuri wanita yang hamil, sehingga lahir (kandungannya). dan (tidak boleh digauli) yang tidak hamil sampai dia beristibra' dengan satu kali haid. (H.R. Abu Daud)."*<sup>99</sup>

Hadits ini membicarakan masalah perempuan tawanan perang yang lagi hamil menjadi budak karena merupakan rampasan perang, buktinya ujung hadits ini menjelaskan bahwa perempuan yang tidak hamil memadai dengan *istibra'*

<sup>98</sup>Drs. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A, *Fiqh Munakahat*, h. 126.

<sup>99</sup>Mahjuddin, *Masā'ilul-Fiqh, Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 52.

(menunggu masa tertentu untuk memastikan kosong rahim seorang budak perempuan) hanya dengan satu kali haid. Sedangkan *istibra'* hanya dengan satu kali haid hanya berlaku pada budak, tidak berlaku pada perempuan merdeka. Perempuan-perempuan tawanan tersebut tidak dapat disamakan dengan kasus seorang perempuan yang hamil karena zina. Kehamilan pada perempuan tawanan perang berlaku *istibra'*, karena kehamilan perempuan tersebut adalah dikarenakan suaminya, oleh karena itu, wajib menunggu sampai melahirkan. Berbeda halnya dengan perempuan yang hamil karena zina, kehamilannya itu tidak dihormati. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban ber'iddah.<sup>100</sup>

Sedangkan dalil yang dikemukakan oleh yang mengharamkannya adalah berdasarkan Hadits Nabi SAW :

عَنْ رُوَيْفِي بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ (اخرجه الترمذي وصححه ابن حبان)

Artinya:

*“Dari Ruwaifi bin Sabit RA berkata, Rasulullah bersabda tidak halal lagi bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, menuangkan air bibitnya pada tanaman orang lain”.* (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi).<sup>101</sup>

Yang dimaksud dengan tanaman orang lain maksudnya haram melakukan persetubuhan dengan wanita yang sudah dihamili orang lain. Baik hamilnya

<sup>100</sup>Ibnu Hajar Haitamy, *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah* (Jus 1V; Beirut: Dar al-Fikri, 1989) h. 93-94.

<sup>101</sup>Masjful Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah Kapita Selektu Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2007), h. 145.

karena zina maupun hubungan suami istri yang sah. Singkatnya, bila seorang wanita sedang hamil, maka haram untuk disetubuhi oleh laki-laki lain, kecuali laki-laki yang menghamilinya. Asbabulwurud hadits tersebut untuk menjauhi menggauli wanita tawanan perang yang hamil, karena kandungannya terhormat, maka haram menggaulinya. Tidak sama halnya dengan kandungan karena zina, sesungguhnya tidak ada penghormatan baginya yang menghendaki kepada haram menggaulinya.<sup>102</sup>

- c. Sepakat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan, perkawinan dengan seorang laki-laki dengan wanita yang telah dihamili oleh orang lain adalah sah, karena tidak terikat dari perkawinan orang lain. Dan boleh pula mengumpulinya karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Maka bayi tersebut tetap bukan keturunan orang mengawini ibunya.<sup>103</sup>

Dari uraian di atas, penulis mengemukakan argumentasi bahwa perkawinan dengan wanita hamil adalah sah, baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya, tanpa melihat adanya syarat-syarat yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm di atas. Karena penulis menganggap bahwa syarat itu tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya perkawinan itu. Dan penulis menyetujui pendapat yang menetapkan, bahwa dilarang bagi laki-laki yang bukan menghamilinya mengumpuli istrinya, sampai lahir kandungannya.

---

<sup>102</sup>Ibnu Hajar Haitamy, *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiah* (Jus 1V; Beirut: Dar al-Fikri, 1989), h. 94.

<sup>103</sup>Mahjuddin, *Masāil al-Fiqh, Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 52.



## 2. *Perkawinan Wanita Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam*

Menikahi wanita hamil karena zina bukanlah masalah baru hal ini pernah terjadi pada masa Rasulullah, oleh karena itu penulis ingin meneliti kembali sejauh mana relevansi baik menurut hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur masalah perkawinan wanita hamil karena zina yang terdapat dalam bab VIII pasal 53 yang berbunyi:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Penegasan KHI ini sesuai dengan pendapat yang diutarakan oleh As-Shabuni dalam kitabnya *ar-Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkamin Al-Quran* bahwa, ada dua pendapat tentang menikahkan orang yang telah berzina, yaitu:

- a. Pendapat yang mengharamkan untuk menikahkan orang yang telah berzina, hal ini telah dikutip dari riwayat Sayyidina Ali, al-Barra', A'isyah dan Ibnu Mas'ud. Mereka menyandarkan pendapat para dhahir dari firman Allah swt. Surah an-Nuur ayat 3, dijelaskan bahwa “ laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan wanita yang berzina, atau

wanita musyrik” begitu dengan sebaliknya.<sup>104</sup> Mereka berpendapat bahwa surah an-Nur di atas memberitahukan suatu pemahaman menikahi mereka yang telah berzina, dan lebih tegasnya dapat dilihat di akhir ayat yang berbunyi “dan hal demikian diharamkan bagi orang-orang mukmin,” Sayyidina Ali sungguh pernah berkata bahwa apabila seorang laki-laki berzina maka ia dipisahkan dengan istrinya, dan begitu pula sebaliknya.<sup>105</sup>

- b. Pendapat yang membolehkan untuk menikah mereka yang telah berzina yaitu diambil dari pendapat Abu Bakar, Umar dan Ibnu Abbas, dan ini adalah pendapat jumhur ulama yang mereka menyandarkan pendapatnya kepada beberapa salah satu yang sanad terakhirnya dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah saw, ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan perempuan dan hendak menikahnya beliau bersabda: “permulaannya adalah zina akhirnya adalah nikah, dan sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal (nikah).<sup>106</sup>

Sementara itu Kompilasi Hukum Islam yang secara khusus dalam babnya mengatur perkawinan wanita hamil, yaitu bab VIII pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 didalamnya ditetapkan bahwa “*wanita hamil di luar nikah dapat dinikahi dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada*

---

<sup>104</sup> Ash-Shabuni, *Rawa’i al-Bayaan Tafsir Al-Ahkam min Al-Quran*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001), h. 33.

<sup>105</sup> Ash-Shabuni, *Rawa’i al-Bayan Tafsir Al-Ahkam min Al-Quran*, h. 33.

<sup>106</sup> Ash-Shabuni, *Rawa’i al-Bayan Tafsir Al-Ahkam min Al-Quran*, h. 39.

*dalam kandungannya terlebu dahulu, dan perkawinan pada saat hamil tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.<sup>107</sup>*

Dengan demikian perkawinan wanita hamil di luar nikah ditetapkan oleh KHI, bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan dapat ditafsirkan pula “dapat” bahwa wanita hamil dapat pula dikawinkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.

Berarti perkawinan wanita hamil di luar nikah boleh dilakukan baik laki-laki yang menghamilinya ataupun pria lain yang bukan menghamilinya yang ingin bertanggung jawab terhadap wanita tersebut, karena bisa jadi kehamilan itu bukan atas dasar perbuatan zina melainkan perkosaan terhadapnya yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak jelas keberadaannya. Dan dengan tujuan untuk menjaga aib wanita hamil tersebut.

Oleh sebab itu, wanita hamil di luar nikah boleh dinikahkan dengan pria mana pun yang mau bertanggung jawab, karena apabila wanita hamil tersebut tidak dapat dinikahkan dengan pria lain yang tidak menghamilinya sedangkan pria yang menghamilinya tidak bertanggung jawab, dan tidak dilaksanakannya pernikahan dalam batas-batas tertentu akan menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga wanita tersebut.

---

<sup>107</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Fokus Media, 2002), h.14.

**BAB IV**

**STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI**

**PERKAWINAN WANITA HAMIL**

**A. *Status Anak dari Perkawinan Wanita Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam***

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakekatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika berasal dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sudah resmi, antara seorang pria dengan seorang wanita. Bila wanita itu hamil dan lalu melahirkan, maka keturunan anak tersebut jelas ayahnya. Menurut pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.<sup>108</sup> Demikian pula para fuqaha' sepakat menentukan bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah:

---

<sup>108</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 80-81.

*Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Anak itu bagi siapa yang menggauli ibunya (dalam nikah yang sah) dan orang yang berzina haknya adalah batu” (HR. Muslim)*

Perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil bertujuan untuk memberikan status yang sah dan jelas terhadap anak yang dikandung agar anak yang dikandung oleh wanita tersebut mempunyai kedudukan yang bernasab kepada bapaknya.

Pada dasarnya setiap anak, baik lahir dalam perkawinan maupun di luar perkawinan, dilahirkan memiliki status dan kondisi fitrah yang bersih, tanpa dosa dan noda. Tidak ada anak yang lahir dengan membawa dosa turunan dari siapapun termasuk dari kedua orang tuanya yang melakukan perzinaan. Perzinaan memang sebagai salah satu dosa besar sebagaimana dinyatakan oleh Husain Adz-Dzahabi, bahwa zina adalah sebagai dosa besar yang kesepuluh.<sup>109</sup>

Julukan yang sudah terlanjur melekat pada diri anak yang dilahirkan dalam kasus perzinaan memang ada sejak dahulu. Tidak begitu jelas julukan ini pertama kali muncul di dunia ini, tetapi yang jelas apapun nama, julukan dan predikat anak zina, secara hukum ia tetap sebagai anak yang bersih dan suci. Anak zina juga masuk dalam kategori “maulud” anak yang dilahirkan, sebagaimana disebutkan dalam hadis :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يُمَجْسِسَانِهِ

<sup>109</sup>Adz-Dzahabi, *Kitab al-Kaba'ir* (Jakarta: Syirkah Dina Mutiara Berkah Utama, tth), h. 42.

Artinya:

*Dari Abu Hurairah r.a berkata; Rasulullah saw bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi. (HR. Ahmad, Ad-Darimi, an-Nasa'I, Ibnu Jarir, Ibnu Hibban, Ath-Thabrani, al-Hakim, Abu Na'im, dan al-Baihaqi).*

Berdasarkan hadis ini dapat dikemukakan, bahwa setiap bayi tanpa kecuali, termasuk yang lahir dalam kasus perselingkuhan, perzinaan, dan dalam kondisi normal tetap dalam kondisi bersih suci tanpa dosa sedikit pun. Apalagi menanggung dan memikul beban dosa kedua orangtuanya yang terlihat dalam kasus hubungan terlarang. Kalau anak zina saja dianggap bersih, maka anak yang lahir dalam kasus nikah di bawah tangan, nikah siri, dan dalam berbagai bentuk pernikahan apapun tentu saja harus lebih ditekankan kefitraan dan kebersihannya.<sup>110</sup>

Dalam kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tentang anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99 yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami-istri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>111</sup>

Kalau diperhatikan ketentuan pada huruf (a) akan jelas bahwa kompilasi Hukum Islam membuka kemungkinan bagi tertampungnya anak yang lahir akibat

---

<sup>110</sup>Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 125.

<sup>111</sup>Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 62

perkawinan hamil ke dalam pengertian anak sah, sekalipun anak itu dilahirkan beberapa hari setelah perkawinan dilaksanakan. Karena itu Kompilasi Hukum Islam memformulasikan suatu cara untuk menghindari atau menutupi adanya anak luar kawin dengan ketentuan pasal 53.

Bagi wanita pezina yang kawin saat hamil dengan lelaki yang menghamili maka status anak tersebut sah menjadi anak dari bapak biologisnya apabila si bapak mengakuinya. Hal ini berdasarkan pada keputusan yang diambil oleh Sahabat Umar bin Khattab di mana beliau menasabkan anak-anak jahiliyah (pra Islam) pada mereka yang mau mengakui sebagai anaknya setelah Islam.<sup>112</sup> Sahabat Ibnu Abbas juga pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan perempuan kemudian menikahinya. Ibnu Abbas menjawab: “Awalnya berzina. Akhirnya menikaah itu tidak apa-apa”.

Dari kalangan empat madzhab, Imam Abu Hanifah pendiri madzhab Hanafi yang paling *sharih* (eksplisit) menegaskan sahnya status anak zina dinasabkan pada bapak biologisnya apabila kedua pezina itu menikah sebelum anak lahir. Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* mengutip pandangan Abu Hanifah demikian:

“Seorang lelaki yang berzina dengan perempuan dan hamil, maka boleh menikahi perempuan itu saat hamil. Sedangkan status anak adalah anaknya”.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup>Berdasarkan riwayat Abdur Rozzaq dalam *Al-Mushannaf* 7/123 dan Baihaqi dalam *As-Sunan al-Kubro* 10/263.

<sup>113</sup>Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* 9/122



### **B. Status Anak yang Dilahirkan Menurut Pendapat Ulama**

Dalam madzhab Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat pertama bahwa nasab anak zina tetap kepada ibunya, bukan pada bapak biologisnya walaupun keduanya sudah menikah sebelum anak lahir. Ini pendapat mayoritas ulama madzhab Syafi'i.

Pendapat kedua, status anak zina dalam kasus ini dinasabkan kepada ayah biologisnya apabila anak lahir di atas 6 bulan setelah akad nikah antara kedua pezina. Dan tidak dinasabkan ke ayah biologisnya jika anak lahir kurang dari enam bulan pasca pernikahan, kecuali apabila si suami melakukan ikrar pengakuan anak. Wahbah Zuhaili dalam *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* menyatakan:

Ulama sepakat (halalnya pria pezina menikahi wanita yang dizinahi. Apabila melahirkan anak setelah enam bulan akad nikah maka nasabnya ke pria itu. Apabila kurang dari 6 bulan dari waktu akad nikah maka tidak dinasabkan padanya kecuali apabila si pria membuat ikrar dengan mengatakan bahwa anak itu darinya dan tidak menjelaskan bahwa ia berasal dari zina. Maka dengan ikrar ini nasab anak tersebut tetap pada ayah biologisnya).<sup>114</sup>

Masalah penting lain yang dikemukakan dan bahkan diperdebatkan oleh para ulama adalah jika pengakuan nasab itu datang kepada anak yang lahir dari seorang wanita yang berstatus lajang. Baik janda maupun perawan yang jelas-jelas tidak memiliki seorang suami. Pendapat pertama dikemukakan oleh Urwah bin

---

<sup>114</sup><https://www.konsultasiagama.com/2017/12/status-anak-dari-pernikahan-hamil-zina.html>

Zubair, Salman bin Yasar, Abu Hanifah, Hasan al-Bashri, Ibnu Sirin, An-Nakha'i, Ishaq bin Rahuyah, Ibnu Taimiyyah, dan Ibnu al-Qayyim. Mereka menyatakan anak zina tetap bisa dinasabkan kepada laki-laki yang menzinai ibu kandungnya, jika memang lelaki itu mengakuinya dan benar-benar si wanita itu tidak bersuami dan bukan berstatus budak. Bahkan secara lebih tegas, Abu Hanifah sebagaimana di kutip oleh Abdul Aziz al-Fauzan mengatakan:

Diriwayatkan oleh Ali bin Asyim, dari Abu Hanifah, beliau berkata bahwa menurut saya tidak masalah jika ada seorang laki-laki yang menzinai seorang wanita sehingga si wanita itu hamil, lalu dinikahnya pada saat ia hamil dan si suami itu diam-diam saja atas kejadian yang dialaminya, anak itupun bisa dinasabkan kepada lelaki dimaksud.

Menurut pendapat kedua, anak zina tidak bisa bernasab dengan ayah biologisnya, walaupun ia mengakuinya, anak zina itu hanya bisa bernasab dengan ibu kandungnya. Pendapat kedua ini dikemukakan oleh imam-imam mazhab yang empat dan mazhab az-Zhahiriyyah.<sup>115</sup>

Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat jika seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang pernah dikumpuli atau sudah, dalam waktu 6 bulan kemudian wanita tersebut melahirkan anak setelah 6 bulan dari perkawinannya bukan dari masa berkumpulnya, maka anak yang lahir itu tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan mengandung. Adapun Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang melahirkan itu tetap dianggap

---

<sup>115</sup>Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 120-122.

berada dalam ranjang suaminya. Karena itu, anak yang dilahirkan dapat dipertalikan nasabnya kepada ayah pezinanya sebagai anak sah.<sup>116</sup>

Bagaimana jika perempuan hamil itu dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya? Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya. Untuk menjawab masalah ini kita harus melihat pendapat dikalangan ulama. Pendapat yang dianggap logis dan rasional adalah yang dikemukakan oleh Imam Muhammad al-Syaibani, yang mengatakan bahwa perkawinan dengan wanita hamil adalah sah tetapi haram baginya melakukan *coitus*, sampai anak yang dikandung itu lahir.

Pemikiran as-Syaibani tersebut menghendaki pemisahan perkawinan hamil dengan anak yang dikandung, agar tidak terjadi percampuran keturunan, maka beliau mengharamkan melakukan hubungan badan sebelum si anak lahir. Dan jika si anak lahir, maka logikanya anak itu adalah anak si ibu yang melahirkan, dan tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menikahi ibunya.<sup>117</sup>

Mengenai status anak yang dilahirkan hasil dari kawin hamil. Ada dua pendapat:

1. status anak yang dilahirkan tetap sebagai anak zina. Dan karena itu dinasabkan pada ibunya. Bukan pada pria yang menikahi ibunya karena faktanya ia bukan ayah biologisnya. Apabila anak tadi terlahir perempuan, maka yang menjadi walinya adalah wali hakim atau pejabat KUA (Kantor Urusan Agama).

---

<sup>116</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 159-160

<sup>117</sup>Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 62-63.

2. Kedua, menurut Mazhab Hanafi, anak yang dikandung dianggap mempunyai hubungan darah dan hukum yang sah dengan pria yang mengawini wanita tersebut.<sup>118</sup>

Mengenai bayi yang lahir dari padanya, sepakat ulama Hukum Islam menetapkan bahwa status anak itu termasuk anak zina bila laki-laki yang mengawininya bukan orang yang menghamilinya. Tetapi bila yang mengawini itu termasuk orang yang menghamilinya, maka terjadi dua macam pendapat di kalangan Ulama Hukum, yaitu:

- a. Ada yang menetapkan bahwa bayi itu termasuk anak zina, bila dikawini setelah kandungannya berumur 4 bulan ke atas; dan bila kurang dari umur kandungan tersebut, maka bayi yang dilahirkannya termasuk anak suaminya yang sah.
- b. Ada lagi yang menetapkan bahwa bila ibunya sudah hamil, meskipun kandungannya baru beberapa hari, kemudian dikawini oleh orang yang menghamilinya, maka bayi yang dilahirkannya bukan anak suaminya yang sah. Karena keberadaannya dalam kandungan, mendahului perkawinan ibunya; maka bayi tersebut termasuk anak zina.<sup>119</sup>

Di samping itu, menurut Ahmad Husni, bila terdapat perempuan hamil di luar nikah, lalu ia menikah dengan laki-laki yang bukan membuahi kehamilannya, maka anak yang dilahirkan oleh wanita itu menjadi anak yang sah. Hal ini

---

<sup>118</sup>Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Jus II (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, I. th), h. 12-23

<sup>119</sup>Dr. H. Mahjuddin, *Masāil alFiqh, Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islami* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 63-64.

disebabkan adanya kesediaan laki-laki tersebut menikahi wanita hamil tadi, berarti secara diam-diam ia telah mengakui anak yang lahir dari perkawinan tersebut, kecuali suami wanita itu mengingkari dengan cara lain. Ketentuan ini adalah sejalan dengan hal yang tersebut dalam fikih Syafi'i, dimana disebutkan bahwa wanita hamil karena zina dapat saja dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya dan sah sebagai suami-isteri dengan segala akibat hukumnya, dan anak tersebut menjadi anak yang sah dari laki-laki tersebut, sebagaimana juga diungkapkan oleh Imam Hanafi.<sup>120</sup>

Lain halnya dengan apa yang terdapat menurut Kompilasi Hukum Islam, dimana laki-laki yang menghamili wanita itu saja yang boleh menikahi dengan wanita yang hamil tersebut. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi percampuran nasab anak yang lahir itu apabila wanita itu kawin dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.

---

<sup>120</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 93.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

1. Status hukum perkawinan wanita hamil akibat zina di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi, perkawinan tersebut adalah sah dan dibolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Lain halnya dengan Mazhab Malikiyah dan Hanabilah, wanita yang hamil di luar nikah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Bahkan tidak boleh juga dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keberadaannya (hamil), kecuali wanita tersebut telah habis masa iddahannya dan wanita tersebut benar-benar telah bertaubat. Namun secara umum dapat disimpulkan bahwa perkawinan wanita hamil tersebut tetap dinilai sah oleh para Imam Mazhab, dengan syarat telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang dianggap sebagai syarat sah perkawinan wanita hamil yang ditentukan oleh masing-masing Mazhab. Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat (1) perkawinan wanita hamil akibat zina adalah sah bila yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya.
2. Status anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil adalah anak sah apabila yang menikahi ibunya adalah laki-laki yang menghamilinya. Hal tersebut dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 dan

pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Adapun apabila yang menikahi ibunya adalah laki-laki yang bukan menghamilinya maka status hukum anak tersebut ialah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sementara dalam hukum Islam menyaratkan minimal jarak waktu antara perkawinan dan melahirkan anak itu 6 (enam) bulan baru dapat dinasabkan kepada bapaknya.

#### **B. Implikasi Penelitian**

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, sesuai dengan adanya permasalahan yang terjadi maka penyusun memberikan sedikit saran kepada instansi terkait antara lain:

1. Kepada orang tua diharapkan dapat membimbing anak-anaknya dengan mengajarkan dan menanamkan norma-norma agama untuk menghindari terjadinya perkawinan hamil di luar nikah.
2. Kepada para pejabat lembaga Peradilan Agama, KUA, serta para akademisi, kiranya perlu adanya upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari kawin hamil, sehingga masyarakat tidak salah pemahaman mengenai adanya ketentuan kebolehan kawin hamil dalam Pasal 53 KHI dengan pemaknaan sebagai celah legalisasi perzinahan berpayung hukum.
3. Penulis menghimbau kepada remaja agar berhati-hati dalam pergaulan terhadap lawan jenis karena dorongan hawa nafsu, seringkali



menjerumuskan manusia ke lembah dan penyimpangan terhadap norma-norma agama.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Anshary MK. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Aminuddin, Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ash-Shabuni. *Rawa'i al-Bayaan Tafsir Al-Ahkam min Al-Quran*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiah, 2001.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003.

Hakal, Abduttawab. *Rahasia Perkawinan Rasulullah Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*. Cet. I; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Hazairin. *Tinjauan mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*. Jakarta: Tinta Mas, 1996.

Humaedillah, Memed. *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Jakarta; Gema Insani, 2002.

Haitamy, Ibnu Hajar. *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiah*. Jus 1V; Beirut: Dar al-Fikri, 1989.

Irfan, Nurul. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Cet. II; Jakarta: Amzah, 2013.

al-Jaziry, Abd ar-Rahman. *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. jilid 5, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.

Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka, 2012.

- Mubarok, Jaih. *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi II Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983.
- Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah, Berbagai kasus yang dihadapi "Hukum Islam" Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Mahjuddin. *Masāil al-Fiqh, Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2012.
- an-Naisaburi, Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi. *Ensiklopedia Hadits 3 Shahih Muslim 2*, Penerj. Ferdinand Hasmand Dkk. Jakarta : Almahira, 2012.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir fi Zilalil Quran*, Beirut: Darus Syuruq, 1987.
- Rahman, Musthofa. *Anak Luar Nikah Status Dan Implikasi Hukumnya*. Jakarta : Penerbit Atmaja, 2003.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Rahman, Bakri A., dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*. Cet. I; Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1981.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Samin, Sabri. *Fikih II*. Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 1983.

Syuhud, A. Fatih. *"Hukum Menikahi Wanita karena Zina" dalam Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Alkhoirot, 2013.

al-Syathibi. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Jus II; Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, I. th.

Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta : Prestasi Pustakaraya, 2012.

Yanggo, Huzaemah T. *Fiqih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: al-Mawardi Prima, 2001.

Zuhdi, Masjfuk. *Masa'il Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2007.

az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami*. Cet ke-1; Beirut: Dār al-Fikr, 1991.

<http://iethafairuz.blogspot.co.id/2017/12/tinjauan-umum-tentang-anak-di-luar-nikah.html> di akses pada tanggal 19 maret 2018 pukul 19.24.

<http://dmino.blogspot.co.id/2017/12/hukum-islam-di-indonesia.html> di akses pada tanggal 15 April 2018 pukul 21.30 WITA.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : Tahun 2018 / 1424

TENTANG

PANITIA, PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI

TAHUN 2018

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan  
Nama : Irmayanti Sidang  
NIM : 10100114246  
Jurusan : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan  
Hari/Tanggal : Selasa, 24 Juli 2018  
Prial : Ujian Seminar Hasil/Skripsi  
Judul : "Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)"

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;  
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
Sekretaris : Dr. H. Supardin, M.H.I.  
Penguji I : Dr. Hj. Numaningsih, M.A  
Penguji II : Dr. Hj. Patimah, M.Ag  
Pelaksana : 1. Drs. M. Ikhsan Zainuddin, M.M  
2. Sri Hajati, S.H.I.

Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi  
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2018;  
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Samata Gowa  
Pada tanggal Juli 2018  
Dekan,  


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.  
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor 144 Tahun 2018

TENTANG

PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI TAHUN 2018

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

**Membaca** : Surat Permohonan :  
Nama : Irmayanti Sidang  
NIM : 10100114246  
Jurusan : Hukum Acara Perdilan dan Kekeluargaan  
Hari/Tanggal : Sanint, 30 Juli 2018  
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi  
Judul : "Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)"

**Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;  
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
Sekretaris : Dr. H. Supardin, M.H.I.  
Penguji I : Dr. Hj. Nurnaningsih, M.A  
Penguji II : Dra. Hj. Patimah, M.Ag.  
Pelaksana : 1. Nasirah Asri, S.Kom.  
2. Sufirman

**Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Munaqasyah/Skripsi

**Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibeban kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2018;

**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di  
Pada tanggal

: Samata Gowa  
: 26 Juli 2018

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.  
NIP. 19640601 199303 1 003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Skripsi yang berjudul “Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam), bernama Irmayanti Sidang lahir di Pinrang pada tanggal 16 Februari 1996 dari pasangan suami-istri Bapak Drs. H. Lasidang M.Pd dan Ibu Dra. Hj. Masiani. Penulis adalah putri kedua dari 5 bersaudara. Penulis sekarang bertempat tinggal di Perumahan Griya Antang Harapan Blok AB No 16,

Kecamatan Manggala, Kelurahan Tamangapa, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Asal daerah dari Pinrang tepatnya di Jl. Poros Langnga Perumahan Tassokkoe Blok A2/2.

Menyelesaikan pendidikan ditingkat sekolah dasar (SD) tepatnya sekolah dasar negeri (SDN) 4 Pinrang dan lulus pada tahun 2008. Penulis kemudian lulus dari Madrasah Tsanawiyah DDI Lil-Banat Pare-pare (MTs) tahun 2011 dan lulus dari sekolah menengah kejuruan pada tahun 2014 di SMK Negeri 1 Pinrang. Ketika duduk di bangku sekolah menengah kejuruan (SMK), penulis aktif di beberapa organisasi seperti halnya aktif dalam lembaga OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) dalam organisasi Remus (Remaja Mushallah) dan menjabat sebagai anggota.

Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan mengambil program S1 pada Jurusan Peradilan prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Fakultas Syariah dan Hukum. Pada masa pertengahan perkuliahan penulis menyempatkan diri berbisnis menjadi produsen jilbab rawis (Hijab NN).